

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2004

Dugaan Korupsi Paiton Dilaporkan ke KPTPK

Pelapor mempertanyakan komitmen kejaksaaan menangani kasus ini

JAKARTA — Lama tak terdengar, kasus korupsi Paiton kembali mencuat. Kali ini kasus dugaan korupsi proyek listrik swasta ini sampai ke meja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK).

Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) meminta komisi antikorupsi mengambil alih kasus yang berpotensi merugikan uang rakyat tidak kurang dari Rp 35 triliun.

Lamria Siagian, salah seorang pelapor, mempertanyakan komitmen kejaksaaan menangani kasus ini. Sudah sangat lama, dia menyebut, kasus ini tidak terdengar sampai di mana perkembangannya. Padahal, indikasi korupsi sangat jelas terjadi.

"Laporan hasil pemeriksaan BPKP, yang terbit lima tahun lalu, sangat jelas menyebut adanya indikasi KKN pada proyek itu. Bahkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan praperadilan kepada kejaksaaan juga sudah memerintahkan institusi itu untuk menyelesaikan segera penyidikannya," kata Lamria usai bertemu Wakil Ketua KPTPK Erry Ryana Hardjapamekas, Selasa (7/9).

Kepada para pelapor, Erry menyatakan akan menanyakan perkembangan kasus ini lebih dulu kepada kejaksaaan. Dia menyebut, sejauh kewenangan yang ada, komisinya dapat saja mengambil alih proses hukum kasus ini. Namun, lanjutnya, pihaknya masih harus mempertimbangkannya lebih lanjut.

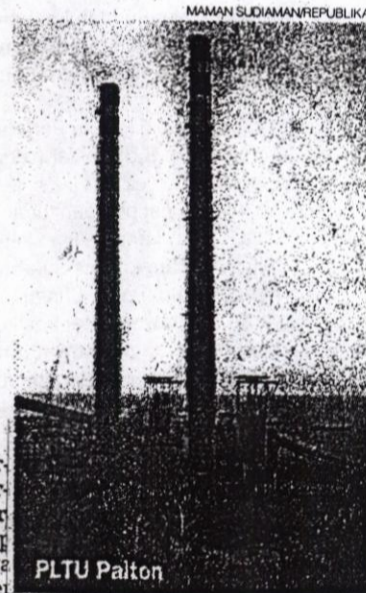
Pada dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Listrik Swasta Paiton I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan sejumlah indikasi kuat terjadinya KKN. Indikasi itu antara lain berupa pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada pihak-pihak tertentu.

Menyangkut kerugian negara, berdasarkan laporan BPKP, Lamria menyebut harga jual listrik PT PEC ke LPN tidak wajar. Terjadi penggelembungan harga terhadap *capitol cost* sebesar Rp 7,015 triliun. Juga ada indikasi terlalu mahal harga per kWh mencapai sekitar Rp 22,2 triliun. Lalu, ada juga kerugian PLN karena harus memikul akumulasi TOP gas di PLTU Gresik sebesar Rp 3,4 triliun. Terakhir, kerugian karena adanya persetujuan Mentamben mengalihkan batu bara untuk dijual langsung ke PT BHP sebesar Rp 1,099 triliun setiap tahun.

Kerugian negara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Laporan BPKP itu menyebutkan adanya keinginan kuat dari investor, BMMG, untuk secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pelanggaran itu antara lain dengan terbitnya Keppres No.37/1992 dan sejumlah peraturan turunannya.

Keppres itu, memungkinkan perusahaan modal asing (PMA) masuk di bidang ke-listrikan, mendapatkan fasilitas repatriasi modal dan keuntungan sekaligus juga mendapatkan kemudahan pajak sepanjang usia usaha. Berbekal keputusan presiden itu juga, investor bisa melangkahi UU No.1/1967 jo UU No.11/1970.

Juga terbit Keppres No.37/1992 yang memungkinkan investor melangkahi UU No.15/1985 jis PP No.36/1979 dan PP



PLTU Paiton

No.10/1989 yang mengatur tentang fasilitas umum (*public utilities*). Dengan mengantungi Keppres istimewa itu, investor tidak perlu lagi ragu menyediakan tenaga listrik tanpa perlu mempertimbangkan mampu tidaknya masyarakat menjangkau harganya.

Terakhir, investor juga mendapatkan keuntungan dengan diterbitkannya Keppres No.37/1992. Dengan keppres itu, pemerintah dapat menunjuk langsung investor yang akan melakukan pengadaan listrik tanpa melalui lelang yang dapat menguntungkan negara.

■ fin

Menagih Kasus-kasus Lama

Lama tak terdengar, kasus Paiton nyaris dilupakan orang. Demikian juga dengan kasus-kasus korupsi yang mendapat perhatian masyarakat lainnya yang hingga sekarang tak terdengar kabarnya. Beberapa pejabat di Kejaksaan Agung sepertinya sudah menutup telinganya ketika ditagih sejauh mana kasus-kasus korupsi itu terungkap. Terakhir, kasus Kanindotex yang ternyata diam-diam sudah dihentikan penyidikannya.

Di bawah ini sejumlah kasus yang hingga sekarang tak terdengar kabarnya, entah dihentikan, atau memang mengambang.

1. Kasus korupsi Perum Perumnas dengan kerugian Rp 8,59 miliar (**tersangka Ir Sarjono**)
2. Kasus korupsi pembangunan jalan Subang-Cikamurang dengan kerugian Rp 2,9 miliar (**tersangka Uus Sukarman dkk**)
3. Kasus korupsi penyalahgunaan pembayaran fee proyek Total Peciko dengan PT Bakrie (**tersangka Anwar Ibrahim**)
4. Kasus korupsi pembangunan kantor cabang PT Taspen di 34 kota dengan kerugian Rp 3 triliun (**tersangka Ida Bagus Putu Sarga**)
5. Kasus korupsi pengelolaan DIK Suplemen Jasa Teknologi Lemigas dengan kerugian Rp 8,9 miliar (**tersangka Ir Bambang Pudjiyanto**).
6. Kasus cassie Bank Bali dengan kerugian Rp 904,6 miliar (**tersangka Tanri Abeng, Setya Novanto, Erman Munzir, Rudi Ramli**)
7. Kasus korupsi penyalahgunaan kredit di NV Indover Bank Amsterdam dan Indover Asia Limited Hongkong (**tersangka Sidharta SP Soerjadi dan Permadi Gandapradja**)
8. Kasus korupsi pengelolaan administrasi keuangan di PT Garuda dengan kerugian Rp 1 triliun (**tersangka Agus Wahyudo**)
9. Kasus korupsi penyalahgunaan kredit likuiditas BI oleh pengurus BPPC
10. Kasus korupsi penyalahgunaan dana DPM oleh pengurus Inkud
11. Kasus korupsi PLTU swasta Paiton
12. Kasus korupsi manipulasi penggunaan additive Kilang Minyak Pertamina (**tersangka Soepratomo Soelaman**)
13. Kasus korupsi pembuatan Amandemen Technical Contract antara Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas (UPG)
14. Kasus korupsi manipulasi atas pengadaan minyak goreng oleh KDI (**tersangka Nurdin Halid**)

Sumber: Laporan JAMPidus 2002/diolah one

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2004

■ Pembangunan Pembangkit Listrik

PLN Akan Bangun 2 PLTP di Lampung dan Sumsel

Jakarta, NERACA

PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membangun dua kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) di Sumatera yaitu Ulu Belu, Lampung dan Lumut Balai, Sumatera Selatan (Sumsel) berkapasitas masing-masing 2 x 55 Mega Watt (MW) yang direncanakan bisa dimulai 2005 dan 2006 mendatang.

"Kita akan bangun dua PLTP tersebut yang tender pelaksanaan pembangunan proyek tersebut rencananya dibuka tahun depan," kata Direktur Pembangkit dan Energi Primer PLN, Ali Herman Ibrahim, di Jakarta, baru-baru ini. Disebutkan untuk pembiayaan pembangunan proyek tersebut saat ini sedang diusulkan ke Japan Bank for International Cooperation (JBIC). "Nanti akan ditenderkan untuk mendapatkan perusahaan yang akan melakukan pelaksanaan pembangunan proyek tersebut," ucapnya.

Menurut Ali, JBIC sendiri telah menyatakan ketertarikannya atas proyek tersebut dan pembiayaan kedua proyek itu telah masuk dalam daftar untuk disetujui mereka. "Diperkirakan pembangunan dua pembangkit tersebut akan menghabiskan biaya sekitar US\$ 110 juta per proyek. Namun, PLN berharap biaya itu bisa turun setelah dilakukan tender nantinya," tutur Ali.

Ia menambahkan, penyelesaian kedua proyek itu juga bergantung dari pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) oleh PT (Persero) Pertamina di kedua daerah tersebut. "Diharapkan, pembangunan PLTP dan PLTU tersebut dapat berjalan paralel dan rampung pada 2007-2008 mendatang," kata Ali.

Keberadaan PLTP Ulu Belu yang berlokasi di Lampung dan PLTP Lumut Balai di Sumsel akan menambah kapasitas pembangkitan listrik di Sumsel yang kini baru mencapai 1.300 MW

Ali berharap, harga listrik yang dihasilkan dari kedua pembangkit itu selain lebih murah dibanding harga listrik dari pembangkit berbahan bakar minyak (BBM), juga bisa lebih murah dibandingkan harga rata-rata listrik dari pembangkit tenaga panas bumi lainnya. "Harga listriknya diperkirakan bisa mencapai US\$ 4,5 sen per kWh atau jauh lebih murah di-

bandingkan tarif listrik rata-rata dari pembangkit BBM yang US\$ 6 sen per kWh," katanya.

Menyinggung progres kesepakatan harga jual listrik dari proyek Paiton Extension (Paiton 3) antara PLN dan PT Paiton Energy, Ali mengatakan bahwa negosiasi masih berlanjut. Menurut dia, opsi penawaran harga tersebut kini berada di pihak Paiton.

"Jadi opsinya sekarang masih di mereka (Paiton), yaitu untuk menawarkan harga listrik. Meski begitu, banyak tawaran dari peminat lain untuk membangun proyek itu," kata Ali.

Ia menyebut investor dari Cina yang telah mengajukan tawaran pada PLN. Namun aku Ali, hal itu masih berupa tawaran belaka, tanpa bentuk konkrit apapun sehingga PLN masih berharap dari negosiasi dengan Paiton. "Paiton memang sudah lebih maju dalam pembangunan proyek itu," ucapnya.

Paiton sendiri terakhir diketahui menawarkan harga jual listriknya sebesar US\$ 4,57 sen per kWh flat. Sementara itu kata Ali, PLN sedapat mungkin berusaha mendapat harga jual di bawah US\$ 4,5 sen per kWh.

Mengenai harga jual listrik dari Paiton ini, PLN sebelumnya mengaku negosiasi dengan pengembang listrik swasta Paiton Energy untuk pembangunan pembangkit Paiton Unit 3 dan Unit 4 masih alot. Pasalnya menurut Dirut PLN Eddie Widiono, sampai saat ini belum ada isyarat untuk sampai pada kesepakatan harga

"Tim kami masih berunding, belum ada angka yang dapat disampaikan. Sebagai pembeli, tentu PLN berharap harga yang disepakati dapat semurah mungkin. Kami belum tahu, sampai kapan negosiasi harga ini akan berlangsung," kata Eddie, baru-baru ini.

Diakui, di tengah masih berlangsungnya negosiasi harga dengan pengembang Paiton, ada beberapa pihak yang menyatakan minatnya membangun pembangkit di tempat yang sama. Bagi PLN sendiri, hal itu tidak ada masalah. "Terus terang, negosiasi yang kita lakukan tidak semata-mata hanya persoalan harga, tetapi juga menyangkut term. Jadi saya kira waktunya tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat," katanya. (22)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 30

TAHUN 2004

Pemadaman Listrik di Sumbar Tidak Menentu

◆ Air Riam Kanan Terus Menyusut

PADANG, KOMPAS — Meski sudah berkali-kali hujan lebat melanda wilayah Sumatera Barat sejak dua pekan terakhir, krisis listrik di Sumbar dan Riau masih juga belum teratasi. Bahkan, dengan dicopotnya General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumbar Ir Soufyan Amin, awal Agustus lalu, keadaan juga tak berubah. Masyarakat kini mengeluhkan pemadaman listrik yang jadwalnya tidak menentu.

"Aneh, sudah ada hujan buatan dengan biaya besar dan sekarang hujan lebat sejak dua pekan terakhir, krisis listrik di wilayah Sumbar-Riau bukannya menjadi teratasi, tetapi malah pemadamannya semakin tak menentu," kata Asril Koto, warga Kototengah, Padang, Selasa (7/9).

Keluhan senada sebelumnya diungkapkan Kepala Biro Media Indonesia/Metro TV Padang Ade Alawi. "Pemadaman listrik sekarang sulit ditebak, tak diketahui lagi kapan matinya. Tak ada pengumuman melalui iklan di surat kabar. Hal seperti ini sangat merugikan masyarakat," ujar Ade saat ditemui di kantornya, Jalan Veteran, Padang.

Seperti pernah diberitakan *Kompas*, pemadaman bergilir sampai enam jam sehari di wilayah Sumbar dan Riau karena musim kemarau yang mengakibatkan muka air danau menyusut drastis. Kondisi seperti ini

menyebabkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kotopanjang, PLTA Singkarak, dan PLTA Maninjau tidak bisa beroperasi optimal. Selain itu, juga terjadi kerusakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin yang berkapasitas 200 megawatt.

General Manager (GM) PT PLN Wilayah Sumbar yang menggantikan Soufyan Amin yang dicopot, Ir Sudirman, Selasa kemarin menyelenggarakan rapat dengan staf. Ia belum bisa dimintai keterangan mengenai masalah ini. "Bapak sedang rapat dengan staf dan tidak bisa ditemui," kata staf GM kepada *Kompas*.

Dugaan korupsi di PLN

Di tempat terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Soehandoyo SH membenarkan bahwa pihaknya kini tengah menyelidiki dugaan korupsi di tubuh PT PLN, terutama terkait

dengan operasional PLTU Ombilin. "Betul, kami tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi," katanya, heran.

Bukan rahasia umum lagi bahwa krisis listrik di Sumbar sejak beberapa bulan belakangan bukan hanya disebabkan faktor alam, tetapi karena manajemen yang tak beres. Kondisi ini sudah lama disinyalir Ketua Badan Pertimbangan Kadin Sumbar Basril Djabar.

Kerusakan PLTU diduga karena memakai batu bara yang tidak memenuhi standar operasi. Batu bara diduga dibeli dari hasil pertambangan tanpa izin di Kota Sawahlunto dengan harga yang diduga digelembungkan.

Air Riam Kanan turun

Hingga kini kemarau masih menghantui PLTA IR PM Noor atau biasa disebut PLTA Riam Kanan, Kalimantan Selatan. Ketinggian air Waduk Riam Kanan terus turun hingga 23 sentimeter dalam sepekan terakhir dan hingga kini belum pernah diguyur hujan.

Manajer PLTA Riam Kanan, Kardoyo, kepada *Kompas*, Selasa, mengatakan, dalam sepekan terakhir ketinggian muka air waduk turun sampai 23 sentimeter. "Hari ini ketinggian air waduk sudah turun menjadi 55,27 meter, padahal sepekan

lalu masih 55,50 meter," kata Kardoyo.

Turunnya muka air itu berlangsung terus-menerus setiap hari. "Sekarang benar-benar terus turun setiap hari. Saya khawatir, kalau tidak segera turun hujan, PLTA bisa tidak beroperasi sama sekali," katanya.

Kardoyo sangat berharap pada bulan-bulan ini segera bisa turun hujan untuk menyelamatkan PLTA Riam Kanan agar tetap bisa beroperasi. Namun, hingga kini kenyataannya belum pernah diguyur hujan. Malah ramalan dari badan meteorologi menyebutkan hujan diperkirakan baru turun akhir Oktober.

"Jika hujan benar-benar baru turun akhir Oktober, dikhawatirkan air waduk tidak mampu lagi memutar turbin sama sekali," kata Kardoyo. Titik terendah ketinggian air waduk yang bisa memutar satu turbin adalah pada level 53 meter.

Jika dalam satu pekan air waduk terus turun sekitar 20 sentimeter, level minimal itu bisa terjadi dalam waktu kurang dari dua bulan. "Kalau sudah mencapai 53 sentimeter, berarti kami sudah tidak bisa beroperasi," katanya.

Oleh karena itu, saat ini PLTA berusaha mengurangi produksi buangan air agar bisa diirit.

(NAL/AMR)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2004

Berhasil Tekan Tunggakan

PLN Jatim Tidak Pedulikan Surat Sakti

SURABAYA (Suara Karya): PLN Distribusi Jatim tak akan memperhitungkan surat sakti pejabat untuk para pelanggan yang terbukti menunggak pembayaran iuran listrik. Mereka akan tetap membongkar jaringan listrik pelanggan yang terbukti tak membayar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penegasan itu dilontarkan Deputy Manager Humas PLN Distribusi Jatim, Ir Faisal Asyhari MT saat dikonfirmasi Suara Karya di Surabaya, Senin (6/9). "Selama ini kita tak bisa konsisten menerapkan aturan, karena banyak sekali surat sakti para pejabat pemerintahan," ujarnya.

Berdasar kenyataan, para pelaksana di lapangan kerap membatalkan rencana pembongkaran jaringan listrik salah satu pelanggan karena ada telepon atau surat sakti dari anggota DPR atau pejabat pemerintahan. Ironisnya, pelanggan yang menggunakan jalur birokrasi seperti itu, kebanyakan

dari kalangan industri sehingga terlalu banyak merugikan PLN.

Sejauh ini, menurut Faisal, nilai tunggakan yang belum dibayarkan pelanggan di lingkungan Distribusi Jatim memang makin menyusut. Dibanding tunggakan tahun lalu yang mencapai Rp 145 miliar, jumlah tunggakan yang tersisa hingga Juli kemarin tercatat tinggal Rp 38 miliar.

Penyusutan nilai itu, juga diperoleh setelah mereka memutuskan saluran listrik untuk berbagai industri yang membandel. Dia kemudian mencontohkan PT Industri Soda Indonesia di kawasan Waru Sidoarjo yang belum lama diputus karena menunggak pembayaran hingga sekitar Rp 6 miliar.

Tiap pelanggan yang terbukti mangkir dari kewajiban membayar iuran listrik selama satu bulan, akan langsung diputus. Setelah diberi kesempatan tiga bulan tak kunjung ada gejala bakal dilakukan pembayaran tunggakan

berikut dendanya, PLN Jatim akan langsung membongkar jaringan yang ada di tempat itu.

Belakangan, prestasi itu memposisikan Jatim sebagai kantor distribusi yang memiliki tunggakan paling rendah dibanding daerah lain. "Memang tak gampang mencatatkan angka tunggakan hingga 0 rupiah, di Jatim, dari 15 Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan 1 Area Pelayanan (AP), hanya dua APJ seperti Madiun dan Malang saja yang nol rupiah," tegasnya.

Angka tunggakan Rp 38 miliar itu, menurut Faisal, akan diupayakan ditekan lagi. Selain memberi sanksi tegas, juga berencana memaksimalkan fungsi meteran pembandingan di tiap gardu. Fasilitas itu nantinya akan digunakan untuk memantau kemungkinan terjadinya pencurian energi listrik.

Menurut dia, setiap gardu yang mensuplai listrik untuk sekitar 50 unit pelanggan, sebetulnya sudah ada meteran pembandingan. Sepan-

jang angka di meteran pembandingan tak sama dengan energi yang dikeluarkan di suatu daerah, pihak PLN, otomatis akan langsung menggelar operasi di kawasan itu.

Di Jatim sekarang ini yang sudah tercatat sebagai pelanggan PLN mencapai 6,2 juta pelanggan. Dari jumlah sebanyak itu, 10 ribu lebih di antaranya termasuk kategori pelanggan untuk kepentingan industri. "Jumlah pelanggan industri memang sedikit, tapi angka pemakaiannya mencapai 49 persen dari total energi yang dikeluarkan," tegasnya.

Konsekuensi dominasi pelanggan rumah tangga, menyebabkan beban puncak di wilayah ini relatif besar. Beban puncak yang biasanya terjadi pukul 18.00 hingga 19.00 WIB, tertinggi mencapai 2.935 MW. "Kalau misal industrinya mencapai 70 persen, pemakaiannya bakal normal, tak bakal ada beban puncak sehebat itu," tegasnya. (A-10)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 12

TAHUN 2004

Ratusan Korban SUTET Jabar Unjuk Rasa

JAKARTA (Media): Ratusan korban SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban SUTET Jawa Barat (Jabar) berunjuk rasa di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kemarin.

Mereka meminta pemerintah segera membayar ganti rugi materiil atas pembangunan SUTET di atas tanah dan rumah mereka. Demonstran juga menuntut pemerintah membentuk tim penyelesaian dan pembebasan tanah serta rumah mereka yang berada di bawah jalur SUTET, dengan melibatkan pihak keluarga.

Selain itu, mereka meminta aparat kepolisian menangkap dan mengadili pejabat PLN dan Departemen Pertambangan dan Energi (Deptamben/kini Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral) yang mereka tuduh melakukan korupsi uang proyek pembangunan SUTET.

Para demonstran mengaku berasal dari Kabupaten Sumedang, Bogor, Cianjur, Cirebon, Majalangka, dan Bandung. Aksi mereka berlangsung sejak pukul 09.00 WIB mulai dari Tugu Proklamasi kemudian *long march* menuju Istana Negara. Akibatnya, jalan raya yang mereka lalui macet total.

Ratusan kendaraan yang ketebetulan berada di belakang para pengunjung rasa terpaksa harus berjalan merayap. Unjuk rasa ini juga melibatkan anak-anak serta didukung mahasiswa dari Forum Kota (Forkot). Mereka datang ke Istana Negara dengan maksud ingin bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun, maksud mereka tidak

terlaksana. Para demonstran kemudian bertahan di depan Istana Negara dengan mendapat pengawasan ketat aparat kepolisian. Karena ruas Jalan Medan Merdeka Utara dipadati ratusan demonstran, petugas terpaksa menutup jalan tersebut mulai dari perempatan Gambir dan Masjid Istiqlal.

Kendaraan yang ingin melewati Jalan Harmoni harus memutar arah ke Jalan Lapangan Banteng kemudian pintu air Masjid Istiqlal. Akibatnya, ratusan kendaraan dari arah Patung Tani terjebak kemacetan hingga berjam-jam.

Salah seorang demonstran, Warni, 25, asal Cianjur, mengatakan sejak adanya pembangunan SUTET di atas rumahnya, ia bersama keluarganya mengalami sakit kepala migran.

"Ternyata bukan hanya saya yang terkena penyakit akibat proyek SUTET, tetapi juga dialami keluarga lain yang di atas rumahnya berdiri bangunan SUTET," katanya.

Menurut Warni, unjuk rasa para keluarga korban SUTET, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, namun tidak pernah ada tanggapan dari pemerintah setempat.

"Karena itu, kami ingin meminta perlindungan dari pemerintah pusat supaya memerhatikan nasib kami yang menjadi korban pembangunan SUTET," ujarnya.

SUTET pertama kali dibangun di Bogor kemudian ke Cianjur, Sumedang, Subang, dan Majalangka. Pembangunan SUTET merupakan kerja sama PLN dengan Jerman. (Sur/J-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1 - 9

TAHUN 2004

Mereka Akan Pilih Mega Jika Dia Bisa Selesaikan Kasus Ini

Korban SUTET Demo di Istana Negara

JAKARTA, (PR).-

Ribuan warga yang menjadi korban Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban SUTET se-Jawa Barat, melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (7/9). Mereka menuntut Presiden Megawati Soekarnoputri untuk segera membentuk tim penyelesaian dan pembebasan tanah yang berada di bawah jalur SUTET, listrik bertegangan tinggi.

Sebelum bergerak ke istana, mereka sejak pukul 8.00 WIB sudah berkumpul di depan Tugu Proklamasi dan melakukan orasi. Rombongan pengunjung rasa itu tiba di Jakarta pada pukul 4.00 WIB dan berkumpul di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Sejak dibangun tahun 1992, masyarakat belum mendapat ganti rugi dari PLN," kata Dedi Mulyadi, perwakilan dari Cianjur. Selain dari Cianjur, aksi unjuk rasa itu juga diikuti perwakilan dari Kab. Sumedang, Kab. Bogor, Cianjur, Cirebon, Majalengka, dan Bandung.

"Kami ingin menuntut keadilan dan ganti rugi. Kami juga ingin menunjukkan bagaimana SUTET tanpa pembebasan tanah telah sangat memiskinkan dan merugikan kami," timpal Agus, seorang korban SUTET dari Kab. Sumedang.

Ditambahkan bahwa sebenarnya dia malas untuk pergi ke Jakarta dan melakukan aksi tersebut, tapi demonstrasi itu adalah kewajibannya untuk menuntut hak. Menurut dia, SUTET tanpa pembebasan tanah telah mengakibatkan mereka hidup dalam ketakutan akan terkena penyakit seperti leukemia, kanker, kemandulan, keguguran, gatal, pusing, dan se-

bagainya. Beberapa penduduk yang tinggal di kawasan SUTET sendiri kini telah terjangkit penyakit tersebut.

Pembangunan menara-menara listrik bertegangan tinggi di atas tanah mereka, yang mayoritas bermata pencaharian buruh, juga telah berakibat jatuhnya harga jual tanah hingga mencapai 90 persen. Sebagai perbandingan, menurut Agus, sebelum menara-menara listrik bertegangan ekstra tinggi itu ada, harga tanah di kawasan Cirebon berada di kisaran Rp 50.000,00 per meter. Namun setelah menara berdiri, harga jualnya hanya sekitar Rp 5.000,00 per meter. Akibat lain yang jelas merugikan korban SUTET adalah tanah yang berubah tidak produktif, sehingga tidak dapat ditanami atau dimanfaatkan.

Mereka menduga, uang ganti rugi yang dialokasikan untuk pembebasan tanah, telah disalurkan oleh pejabat PLN dan Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). "Kami juga minta segera tangkap dan adili pejabat yang melakukan korupsi uang korban SUTET pada 1996-1997," katanya.

Salah satu peserta aksi, Oon Rahmini yang berasal dari Sumedang, mengaku baru mendapatkan uang Rp 6 juta pada 1992. Saat ini, rumah yang tepat berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi

tersebut, tidak ditempati keluarganya. "Saya takut, terutama kalau musim hujan, temboknya bisa nyetrum," ujarnya. Dia mengaku, saat ini tidak akan menerima bila PLN akan mengganti rugi tanah dan bangunannya sebesar Rp 100 juta. Peserta aksi demo mengaku akan tetap berada di depan Istana Negara sampai masalah ini dapat diselesaikan.

Dedi dan sejumlah temannya menegaskan, jika Presiden Megawati bisa menyelesaikan masalah SUTET ini, mereka akan kembali memilih Megawati dalam pilpres putaran kedua 20 September mendatang. "Kami pilih presiden yang memerhatikan kepentingan rakyat, kepentingan kami. Jadi, bukan soal akan pilih Megawati atau SBY. Yang kami cari presiden yang memperhatikan kami," tandasnya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan warga korban SUTET dari Jabar kemarin sempat memacetkan beberapa ruas jalan di ibu kota. Terlebih, pada saat yang sama juga berlangsung demonstrasi yang dilancarkan oleh sekitar 500-an karyawan Perum DAMRI yang menuntut kenaikan gaji. Mereka bergerak dari depan Kantor Pusat Dampri di Jln. Matraman menuju kantor Departemen Keuangan dan Kantor Meneg BUMN di Jln. Lapangan Banteng Jakarta. (A-78/A-83/A-84)***

6

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2004



KORBAN SUTET: Ribuan pengunjung rasa dari keluarga Korban Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) se Jawa Barat mendatangi Istana Negara Jakarta, Selasa (7/9). Dalam aksinya, mereka menilai akibat SUTET banyak masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan.